

MODAL SOSIAL DALAM KEBIJAKAN MUTU DI SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID

SOCIAL CAPITAL in QUALITY POLICY at SENIOR HIGH SCHOOL 1 KOTA MUNGKID

Oleh : Jian Martina Fitriana (12110241011), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, jemartinaf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan modal sosial, kebijakan mutu, modal sosial dalam kebijakan mutu serta faktor pendukung dan penghambatnya di SMA Negeri 1 Kota Mungkid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kesiswaan, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Objek penelitian ini mengenai modal sosial dalam kebijakan mutu sekolah. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu, pengumpulan, reduksi, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) modal sosial yang ditemukan di sekolah terdiri dari jaringan, kepercayaan, norma, persahabatan, dan kerjasama; (2) kebijakan mutu pendidikan mencakup dua hal yaitu kebijakan mutu akademik dan kebijakan mutu non akademik; (3) modal sosial dalam kebijakan mutu yang terdiri dari jaringan, kepercayaan, norma, persahabatan, dan kerjasama mendukung pengembangan kebijakan mutu; (4) faktor pendukung modal sosial dalam kebijakan mutu yaitu; sekolah mendukung guru dan tenaga kependidikan melanjutkan pendidikan, mengikuti organisasi untuk meningkatkan kompetensinya, sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM masih sulit untuk berubah dan manajemen waktu belum maksimal.

Kata Kunci: Modal sosial, kebijakan mutu

Abstract

This study aimed to describe the social capital, quality policy, social capital in the quality policy as well as supporting and inhibiting factors at Senior High School 1 Kota Mungkid. This study used descriptive qualitative approach. Subject of research is the Principal, Vice Principal Curriculum, Infrastructures, Student, teachers, staff, and students. The object of this research on social capital in the quality policy of the school. Data is collected by means of observation, in-depth interviews and documentations. The research instrument was a researcher. Analysis of the data using the model of Miles and Huberman, namely, the collection, reduction, description of the data and drawing conclusions. Test data validity through triangulation of sources, techniques and timing. The results showed that: (1) social capital found in the school consisted of networks, trust, norms, friendship, and cooperation; (2) the quality of education policy includes two things: the quality policy of academic and non-academic quality policy; (3) social capital in the quality policy that consists of networks, trust, norms, friendship, and cooperation to support the development of quality policy; (4) social capital supporting factor in the quality policy is; school support teachers and education personnel continuing education, joined the organization to improve their competence, while the inhibiting factor is still difficult to change human resources and time management is not maximized.

Keyword : social capital, quality policy

PENDAHULUAN

Era perkembangan zaman menuntut manusia memiliki bekal dalam menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan. Tantangan

yang muncul salah satunya adalah daya saing tinggi dalam setiap kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan supaya menghasilkan manusia yang berkualitas,

memiliki keterampilan serta mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusianya.

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat dicapai dengan cara meningkatkan mutu pendidikannya. Pendidikan yang bermutu menjadi pintu bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional di atas dapat dipahami bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi peserta didik yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu di Indonesia.

Namun, pada kenyataannya seluruh sekolah di Indonesia belum memiliki mutu yang sama, keadaan ini yang membuat mutu pendidikan di Indonesia belum merata dan belum semua lembaga pendidikan mengoptimalkan kedelapan standar nasional pendidikan di atas karena faktor belum meratanya pendidikan di Indonesia.

Satuan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah sekolah. Sekolah telah memiliki otonomi sendiri dalam menentukan dan membuat kebijakan sekolah. Seperti yang dijelaskan bahwa berbagai unit antara pusat dan sekolah tidak hanya sebagai perantara, penyampai (transmisi) tetapi perlu menjabarkan membuat kebijakan operasional dan membuat kebijakan sekolah, (Siti Irene A.D, 2015: 21).

Dalam upaya menunjang pendidikan yang berkualitas dan bermutu, salah satunya harus bertumpu pada konteks sosial masyarakat yaitu modal sosial. Modal sosial dalam hal ini memiliki makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar dalam bermasyarakat sekaligus pilar demokrasi. Keterlibatan sekolah dalam sebuah kerjasama yang dijalin dengan banyak relasi mulai dari lembaga pendidikan, swasta, dan relasi lainnya menjadi penguat modal sosial. Bukan hanya kerjasama saja, namun juga menjaga kepercayaan dengan setiap relasi yang dijalin serta mematuhi norma dan nilai yang telah ditetapkan.

Kenyataannya, modal sosial belum banyak dipahami oleh masyarakat sebagai proses pengembangan kebijakan mutu pendidikan. Masalah lain yang muncul adalah modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat melemah, secara tidak langsung hal ini masuk dalam iklim di lingkungan sekolah.

Modal sosial dalam kehidupan di sekolah merupakan hal penting dalam pengembangan kebijakan mutu. Oleh karenanya, setiap komponen di dalam sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa. Setiap komponen harus saling mendukung guna mewujudkan tujuan dan program-program sekolah serta menjalin relasi baik internal maupun eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) modal sosial di SMA N 1 Kota Mungkid, 2) kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid, 3) modal sosial dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid, dan 4) faktor

pendukung dan penghambat kebijakan mutu melalui modal sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan mulai bulan Februari-Maret 2016. Setting penelitian di SMA N 1 Kota Mungkid. Sekolah ini dipilih karena merupakan sekolah unggulan ke-2 di Kabupaten Magelang namun dari tahun ke tahun mutu sekolah semakin meningkat.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Uji Keabsahan Data

Pengujian pada keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan modal sosial yang digunakan untuk mendukung kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid yaitu (1) Modal sosial di sekolah, (2) Kebijakan mutu di sekolah, (3) Modal sosial dalam kebijakan mutu SMA N 1 Kota Mungkid, dan (4) Faktor penghambat dan pendukung kebijakan mutu SMA N 1 Kota Mungkid melalui modal sosial.

1. Modal Sosial di SMA Negeri 1 Kota Mungkid

Sekolah memiliki modal sosial yang membantu sumber daya manusianya berkembang dengan memanfaatkan unsur-unsur di dalamnya. Seperti yang utarakan oleh Cohen dan Prusak (Djamaludin Ancok, 2003) bahwa di dalam jaringan sosial yang terbentuk terdapat kepercayaan dan memiliki kesamaan norma atau nilai yang dianut bersama, maka akan terbentuk persahabatan dan kerjasama di dalamnya. SMA N 1 Kota Mungkid memiliki 5 (lima) unsur modal sosial yaitu jaringan, kepercayaan, norma, persahabatan dan kerjasama, sebagai berikut:

a. Jaringan

SMA N 1 Kota Mungkid memiliki program reguler dan program unggulan guna menunjang mutu pendidikan di sekolah tersebut, tentunya tidak dapat berjalan sendiri untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, oleh karenanya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan, dan siswa memiliki peran yang penting dalam menjalin relasi dengan berbaagai pihak untuk mendukung kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh SMA N 1 Kota Mungkid. Hal tersebut terbukti dengan

masing-masing elemen di SMA N 1 Kota Mungkid membentuk jaringan relasi sesuai dengan tupoksinya. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lawang (Damsar, 2011: 187) bahwa dalam menjalin relasi ada sebuah ikatan yang tidak dapat dilakukan sendiri sehingga harus saling bersinergi satu sama lain.

Keterlibatan guru dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di SMA N 1 Kota Mungkid sangat penting terutama dalam hal PBM. Guru tidak hanya cukup bersosialisasi dengan sesama guru dalam lingkup satu sekolah saja, melainkan dengan mengikuti kegiatan MGMP tingkat Kabupaten Magelang dan organisasi lain untuk meningkatkan kualitas guru mata pelajaran. Selain itu, siswa juga membentuk jaringan melalui mengikuti kegiatan organisasi sekolah yaitu OSIS, Rokhis, Dewan Ambalan Pramuka dan juga melalui kegiatan-kegiatan lomba, mereka juga menjalin hubungan dengan organisasi sejenis yang dimiliki oleh SMA/SMK lain di Kabupaten Magelang untuk mengadakan berbagai kegiatan dan menjalin relasi serta kerjasama dengan ketua organisasi SMA se-Kabupaten Magelang. Slamet Santoso oleh Granovetter (Mohammad Fajar Mustofa, 2013) menjelaskan bahwa jaringan dalam sebuah hubungan sosial antar individu maupun kelompok menjadi media komunikasi dan interaksi sehingga dapat menghasilkan kepercayaan dan kuatnya kerjasama yang dilakukan.

b. Kepercayaan

Menanamkan kejujuran untuk siswa sejak dini melalui kantin kejujuran dan munculnya kepercayaan apabila melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan serta amanah dan sudah tertanam sejak awal pada saat menjadi siswa baru. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Fukuyama (dalam Productivity Commission 2003) menjelaskan bahwa kepercayaan yang ada dalam sebuah komunitas dapat menjadi harapan dengan perilaku biasa, jujur dan kooperatif yang didasari oleh norma yang mengatur seluruh komponen di dalam sekolah.

c. Norma

SMA N 1 Kota Mungkid memiliki tata tertib disertai dengan sanksi. Norma di SMA N 1 Kota Mungkid mengandung nilai-nilai bersama, norma dan sanksi serta aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Selain itu, sekolah juga menetapkan kode etik peserta didik yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) point. Sanksi bersifat *enforcement* bukan *punishment* sehingga sanksi yang diberikan mendidik. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh S. Nasution (2011: 131) bahwa norma yang diajarkan di sekolah tidak boleh bertentangan dengan adat-istiadat masyarakat sekitar sehingga hubungan yang terjalin dengan antara sekolah dengan masyarakat disesuaikan dengan norma yang ada.

d. Persahabatan

Persahabatan muncul menjadi unsur dalam modal sosial yang ada di SMA N 1

Kota Mungkid terbentuk melalui kegiatan *sister school* dengan SMA Negeri 1 Purworejo dan SMA Negeri 5 Palu dilakukan dengan tujuan untuk menjalin persahabatan. Selain itu dalam bentuk *friendly match* di masing-masing cabang olahraga ekstrakurikuler dalam lingkup Kabupaten Magelang antar SMP dan SMA.

e. Kerjasama

Unsur lain dalam modal sosial juga ditemukan dalam bentuk kerjasama yang dijalin oleh berbagai elemen di dalam sekolah meliputi kepala sekolah, guru dan siswa dengan berbagai pihak. Dijelaskan oleh Suranto Aw (2011: 29) bahwa adanya kesadaran memiliki kepentingan yang sama dapat menciptakan kerjasama yang didukung dengan pengetahuan serta pengendalian untuk mewujudkan tujuannya, berupa: 1) *sharing*, berbagi pengalaman dengan sesama guru. Seperti yang dijelaskan Marselous R. Payong, (2011: 20) bahwa dengan forum ini dapat membuat perencanaan pembelajaran secara bersama-sama melalui semangat kolegalitas. Selanjutnya 2) koordinasi, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan Wakil Kepala Sekolah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh sekolah dengan orangtua siswa.

2. Kebijakan Mutu di SMA N 1 Kota Mungkid

Mutu pendidikan dilandasi dengan adanya kebijakan sekolah yang dibuat dalam rangka mencapai peningkatan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid. Kebijakan mutu berkaitan dengan sebuah layanan dan pencapaian hasil

akhir pada sebuah produk. Produk yang diciptakan didasarkan pada standar yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kebijakan mutu sekolah yang digunakan oleh SMA N 1 Kota Mungkid merupakan implementasi kebijakan mutu dari Pusat, seperti yang dipaparkan Direktorat Pendidikan Nasional (2010: 67-68) menjelaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan di sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Jensanaris (2014: 24) menjelaskan bahwa kebijakan mutu dapat dilihat dari 2 segi yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid terdiri dari dua kebijakan yaitu kebijakan mutu akademik dan kebijakan mutu non akademik. Kebijakan mutu yang dikembangkan diantaranya untuk meningkatkan input dengan proses pembelajaran yang optimal sehingga menghasilkan output lulusan yang dapat melanjutkan. Seperti yang dijelaskan oleh Zamroni (2009:38) yang menjelaskan bahwa mutu atau kualitas mempunyai istilah yaitu sekolah favorit dan tidak yang berkaitan tentang kualitas input, proses, kurikulum, output dan lulusan.

Produk yang dihasilkan oleh SMA N 1 Kota Mungkid banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Kedinasan, sisanya adalah bekerja. Dijelaskan pula bahwa sekolah dapat dikatakan efektif apabila input siswa yang dimiliki oleh sekolah tidak sangat baik, namun menghasilkan siswa yang sangat baik melalui proses akademik dan lingkungan sekolah yang mendukung disertai dengan layanan yang menghasilkan kepuasan bagi

pelanggannya. Kebijakan mutu yang berkaitan dengan layanan, seperti telah dijelaskan oleh Edward Sallis (2006: 53) yang mendeskripsikan mutu dilihat dari layanan dan produk akhir yang dihasilkan oleh sekolah. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kebijakan mutu yang dilihat dari segi kebijakan mutu akademik dan kebijakan mutu non akademik:

a. Kebijakan Mutu Akademik

Sekolah memiliki kewenangan dalam mengembangkan cara untuk mengelola sumber daya guna mencapai sasaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Berbagai tindakan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMA N 1 Kota Mungkid. Cakupan mutu menurut Depdiknas (2001: 7-8) antara lain adalah input, proses dan output.

Pertama dari segi input, peserta didik baru diperoleh dari hasil seleksi menggunakan NEM dan prestasi kejuaran dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Input siswa tersebut dikelola dengan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan PMB dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah guru yang memiliki kemampuan, kualitas, pengalaman mengajar dan kreativitas dalam pemanfaatan lingkungan sekitar serta tersedianya bahan ajar di sekolah. *Kedua*, dari segi proses, PBM di sekolah disesuaikan dengan gaya belajar anak sehingga kemampuan guru dalam mengajar diselipkan dengan pembentukan

karakter dan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan berbagai metode belajar mengajar yang guru kembangkan dalam PMB, meliputi: ceramah; diskusi; audio-visual; kuis; presentasi; *study tour*; permainan; *Project Based Learning* dan *Problem Based Learning*. Metode tersebut didukung dengan penguasaan materi sehingga guru mampu menyampaikan materi secara kreatif, kesuluruhan PBM dilandasi dengan implementasi K13. *Ketiga*, dari segi output dilihat dari berbagai segi, pertama yaitu hasil prestasi siswa meliputi UTS, UAS, UN. Kedua, adalah dilihat dari lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Kedinasan serta memasuki dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari aspek ketiga yaitu pelayanan sekolah terhadap masyarakat atau orangtua bersifat terbuka, begitu juga dengan mengutamakan pelayanan kepada siswa. Sehingga kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh SMA N 1 Kota Mungkid menghasilkan jaringan dan kepercayaan yang dilandasi dengan norma.

b. Kebijakan Non Akademik

Kebijakan mutu non akademik di SMA N 1 Kota Mungkid terdiri dari motivasi belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa diselipkan dalam proses kegiatan belajar siswa untuk membentuk sikap dan perilaku warga sekolah sesuai dengan karakter dalam Kurikulum 2013. Selanjutnya, sekolah memfasilitasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam program ekstrakurikuler yang

digunakan untuk menggali potensi siswa sehingga siswa dapat meraih prestasi dibidang non akademik. Kemudian, kebijakan yang berkaitan dengan staf kependidikan juga diatur dalam kebijakan mutu sekolah, hal ini seperti dijelaskan oleh Tilaar (2002: 170-171).

3. Modal Sosial dalam Kebijakan Mutu di SMA Negeri 1 Kota Mungkid

Unsur modal sosial di SMA N 1 Kota Mungkid yang digunakan dalam pengembangan kebijakan mutu sekolah diantaranya ialah: (1) jaringan; (2) kepercayaan; (3) norma; (4) persahabatan; (5) kerjasama. Kelimanya tersebut memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan SMA N 1 Kota Mungkid dalam bentuk program-program, baik reguler maupun unggulan. Modal sosial yang terdapat dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Modal sosial dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid

| No | Unsur Modal Sosial | Kebijakan Mutu | |
|----|--------------------|---|---|
| | | Akademik | Non Akademik |
| 1 | Jaringan | Jaringan digunakan untuk menjalin relasi yang berkaitan dengan input, proses dan output sekolah. | Jaringan digunakan untuk mewadahi potensi siswa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler. |
| 2 | Kepercayaan | Kepercayaan untuk menunjang profesionalitas dalam bekerja dan melandasi hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik dan program unggulan, sehingga sekolah mendapatkan <i>feedback</i> berupa kepercayaan dari masyarakat dan animo dari masyarakat meningkat untuk men- | Kepercayaan digunakan untuk menjaga hubungan dengan relasi dan mendapatkan animo siswa yang memiliki bakat dan potensi di bidang non akademik agar berprestasi meraih juara dalam segala bidang cabang perlombaan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, karisidenan maupun dalam berbagai event. |

Lanjutan Tabel 1. Modal sosial dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid

| No | Unsur Modal Sosial | Kebijakan Mutu | |
|----|--------------------|---|--|
| | | Akademik | Non Akademik |
| | | dapatkan input yang unggul. | |
| 3 | Norma | Norma dibentuk saat kegiatan RAKERDIN pada awal ajaran 2015/2016 oleh warga sekolah. untuk warga sekolah, selain itu dalam menjalin relasi dengan berbagai organisasi internal maupun eksternal | Norma mengatur siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama dengan relasi. |
| 4 | Persahabatan | Persahabatan terbentuk dari kegiatan <i>sister school</i> antar sekolah. | Persahabatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu melalui kegiatan <i>friendly match</i> baik oleh siswa maupun sekolah. |
| 5 | Kerjasama | Kerjasama dilakukan melalui <i>sharing</i> dan koordinasi oleh seluruh elemen di sekolah dalam berbagai kegiatan akademik sekolah. | Kerjasama dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak pendukung kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non akademik sekolah. |

Sumber: Diolah dari Data Primer

Jaringan yang kuat diperoleh dengan cara menjalin relasi dengan berbagai pihak terkait dapat tercipta baik dan positif sehingga memudahkan pihak sekolah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain yang diperkuat dengan kontrak dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). Hubungan yang baik dan solid terbentuk dengan dilandasi adanya kepercayaan yang mendorong untuk berpartisipasi secara aktif baik dengan pihak instansi lain, dengan sesama guru di sekolah dan di MGMP Kabupaten Magelang dan organisasi guru lainnya, organisasi siswa serta hubungan baik dengan orangtua siswa maka kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid

dapat berjalan optimal sesuai dengan yang direncanakan. Kepercayaan yang dimiliki dijaga melalui menjunjung profesionalitas dalam bekerja, komunikatif, proaktif, konsisten, konsekuen, bersikap jujur dan disiplin dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid. Seperti Siti Irene A.D (2015: 169-170) yang menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh sekolah untuk mendapatkan input dan animo dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan input siswa melalui kepercayaan, hubungan sosial, jejaring (*networking*) serta melaksanakan program-program unggulan SMA N 1 Kota Mungkid yang dilandasi dengan norma. Norma dibuat oleh warga sekolah dan untuk warga sekolah. Hal ini sejalan dengan Supardi (2011: 88) yang menjelaskan bahwa norma memiliki fungsi sebagai pegangan untuk berperilaku secara benar, pantas dan layak.

Modal sosial yang terdapat dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid tidak hanya terdiri dari jaringan, nilai dan kepercayaan, namun juga muncul persahabatan yang terbentuk dari kegiatan-kegiatan lomba persahabatan antar SMP dan SMA di Kabupaten Magelang dan *sister school*. Selain itu terjalin kerjasama yang ditandai dengan adanya kegiatan *sharing* baik dalam internal maupun dengan eksternal di organisasi yang diikuti oleh guru maupun siswa. Kegiatan *sharing* dengan pengurus di

organisasi sehingga memunculkan koordinasi saling bersinergis dalam pelaksanaan kebijakan mutu di sekolah. Robert Putnam (John Field, 2003: 51) menjelaskan bahwa jaringan, kepercayaan dan nilai dapat memfasilitasi kegiatan seperti kerjasama dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kelima unsur modal sosial di atas, memudahkan berbagai elemen sekolah dalam mewujudkan pengembangan kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid. Unsur-unsur modal sosial dikuatkan dengan seluruh elemen atau komponen yang dimiliki oleh sekolah saling bersinergis satu sama lain. Siti Irene A.D (2014: 174) yang menyatakan bahwa pengembangan modal sosial dimulai dari penguatan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Modal Sosial dalam Kebijakan Mutu di SMA Negeri 1 Kota Mungkid

Faktor pendukung modal sosial dalam kebijakan mutu di sekolah antara lain memberikan dukungan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya dan mengikuti organisasi MGMP dan organisasi lain untuk berjejaring meningkatkan kompetensinya, profesionalitas kerja yang dijunjung tinggi, sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP dan menerima usulan dari siswa melalui kotak saran, serta kemampuan memecahkan masalah bersama melalui mediasi, sedangkan faktor penghambatnya antara lain sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah,

manajemen waktu yang belum maksimal, kurangnya komunikasi dan siswa belum mandiri seperti yang diharapkan dalam K13.

KESIMPULAN DAN SARAN

Modal sosial di SMA N 1 Kota Mungkid terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu jaringan, kepercayaan, norma, persahabatan dan kerjasama. Modal sosial memudahkan pihak sekolah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain yang diperkuat dengan kontrak dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). Kebijakan mutu pendidikan di SMA N 1 Kota Mungkid dilihat dari 2 (dua) hal yaitu kebijakan mutu akademik yang terdiri dari segi input, proses, output dan kebijakan mutu non akademik yang terdiri dari motivasi belajar siswa, sikap dan perilaku, program ekstrakurikuler dan tenaga kependidikan.

SMA N 1 Kota Mungkid memiliki beberapa unsur modal sosial yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan mutu yang dilihat dari segi kebijakan mutu akademik dan mutu non akademik yaitu unsur jaringan sosial, kepercayaan, norma, persahabatan dan kerjasama. Jaringan yang sudah dimiliki oleh berbagai elemen sekolah sudah bagus dan bermanfaat untuk pelaksanaan kebijakan mutu dalam program reguler dan program unggulan sekolah. jaringan yang dijalin tersebut menumbuhkan kepercayaan yang selalu dijaga dengan menjunjung profesionalitas dalam bekerja, komunikatif, proaktif, konsisten, konsekuen, bersikap jujur dan disiplin dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid. Adanya

jaringan dan kepercayaan yang berjalan baik karena dilandasi norma yang tidak bertentangan dengan norma masyarakat dan dipatuhi untuk menjaga kepercayaan dengan relasi. Selain itu juga ada kegiatan persahabatan dengan sekolah lain se-Kabupaten Magelang. Modal sosial lainnya juga dalam bentuk komunikasi yang di dalamnya terdapat *sharing* di dalam organisasi yang diikuti oleh guru dan siswa sehingga menghasilkan unsur lain modal sosial yaitu koordinasi di dalam setiap kegiatan baik yang ada di dalam organisasi maupun dalam kegiatan pencapaian kebijakan mutu di SMA N 1 Kota Mungkid. Kelima unsur tersebut digunakan oleh komponen sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan kebijakan mutu sekolah.

Faktor pendukung modal sosial dalam kebijakan mutu di sekolah antara lain memberikan dukungan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya dan mengikuti organisasi MGMP dan organisasi lain untuk berjejaring meningkatkan kompetensinya, profesionalitas kerja yang dijunjung tinggi, sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP dan menerima usulan dari siswa melalui kotak saran, serta kemampuan memecahkan masalah bersama melalui mediasi, sedangkan faktor penghambatnya antara lain sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah, manajemen waktu yang belum maksimal, kurangnya komunikasi dan siswa belum mandiri seperti yang diharapkan dalam K13.

Harapannya sekolah dapat mempertahankan dan mengembangkan modal sosial yang dimiliki agar dapat lebih mudah dalam

melaksanakan kebijakan mutu sekolah dan mencapai tujuan sekolah, dan modal sosial ini dapat disosialisasikan ke sekolah lain untuk pengembangan kebijakan mutu, serta untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti setiap detail kebijakan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaludin Ancok. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Dibacakan dalam Rapat Majelis Guru Besar Terbuka UGM pada tanggal 3 Mei 2003. Yogyakarta. (Diunduh pada tanggal 11 November 2015).
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Buku 1: Konsep dan Pelaksanaannya). Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2010). *Pedoman Standarisasi Kompetensi Guru*. Jakarta: BP. Panca Bhakti.
- Edward Sallis. (2006). *Total Quality Management in Education* (Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan). Penerjemah Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCi Sod.
- H.A.R. Tilaar. (2002). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.
- John Field. (2003). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Maselus R. Payong. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Permasalahan dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks.
- Miles M. B & Huberman A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Alih Bahasa: TjetjepRohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mohammad. Fajar Mustofa. (2013). *Peran Modal Sosial pada Proses Pengembangan Usaha* (Studi Kasus: Komunitas PKL SMA N 8 Jalan Veteran Malang). Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Productivity Commission. (2003). *Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications, Research Paper*. AusInfo, Canberra.
http://www.pc.gov.au/data/assets/pdf_file/0018/8244/socialcapital.pdf
(Diakses pada 24 November 2014).
- S. Nasution. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2014). *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan* (Perspektif Teori dan Praktik). Yogyakarta: UNY Press.
- _____. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suranto Aw. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supardi. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Zamroni. (April 2008). *Model Mutu Pendidikan: Profesionalitas Terpadu*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Paradigma Baru Mutu Pendidikan di Indonesia, Dies Natalis UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta.